



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

JANUARI 2025



Media Layanan Informasi DJPK

Mulai **16 Juni 2025**, kanal layanan Contact Center DJPK berkonsolidasi dengan kanal layanan Kemenkeu PRIME:



0811-150-4207



callcenter.djpk
@kemenkeu.go.id



150420



djpk.kemenkeu.go
.id

MENJADI



0813-10004-134



kemenkeu.prime@ke
menkeu.go.id



134



kemenkeu-prime.
kemenkeu.go.id

**Layanan DJPK
yang Tetap Aktif**

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Layanan Konsultasi Video Conference

Melalui email reservasi DJPK:
reservasi.djpk@kemenkeu.go.id
(jam layanan hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB).

Ringkasan Publikasi dan Layanan Informasi

7

Publikasi Website



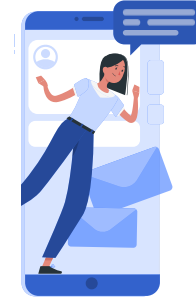
7

**Webinar/FGD/
Workshop/**



99

**Publikasi Konten Media
Sosial**



25

PPID



3

**Blast Whatsapp/
Email**



433

Tiket Konsultasi

*pasca konsolidasi hanya email
yang ke L2 DJPK



69

**Email Reservasi
DJPK**



3

Video Conference



31

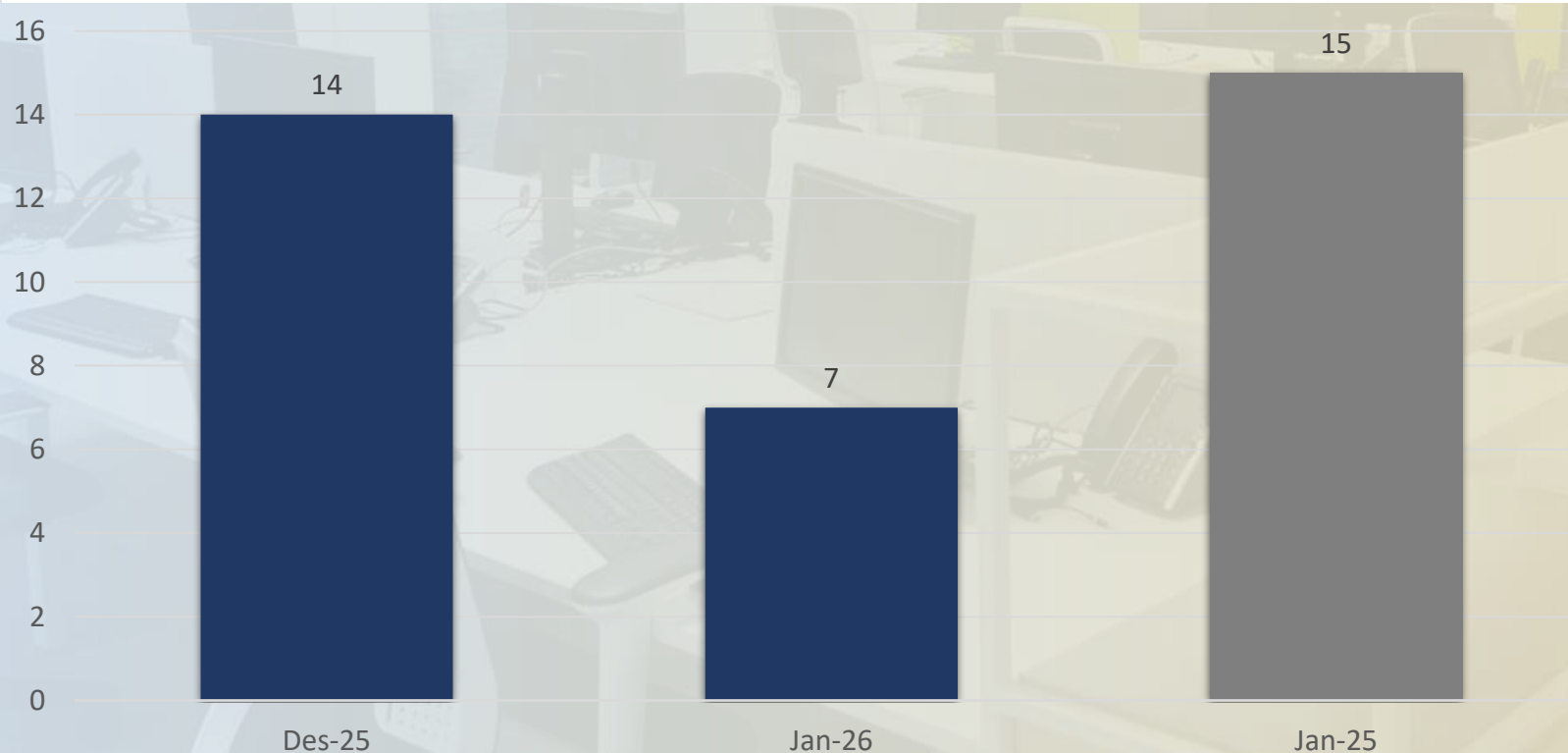
Konsultasi Tatap Muka



Publikasi Website DJPK

Pada Januari 2026, terdapat **7 publikasi** pada Website DJPK yang terdiri dari peraturan dan konsultasi publik.

Jumlah publikasi website bulan Januari 2026 **turun 50%** dibandingkan bulan sebelumnya (14) dan **turun 53%** dibandingkan Januari 2025 (15).



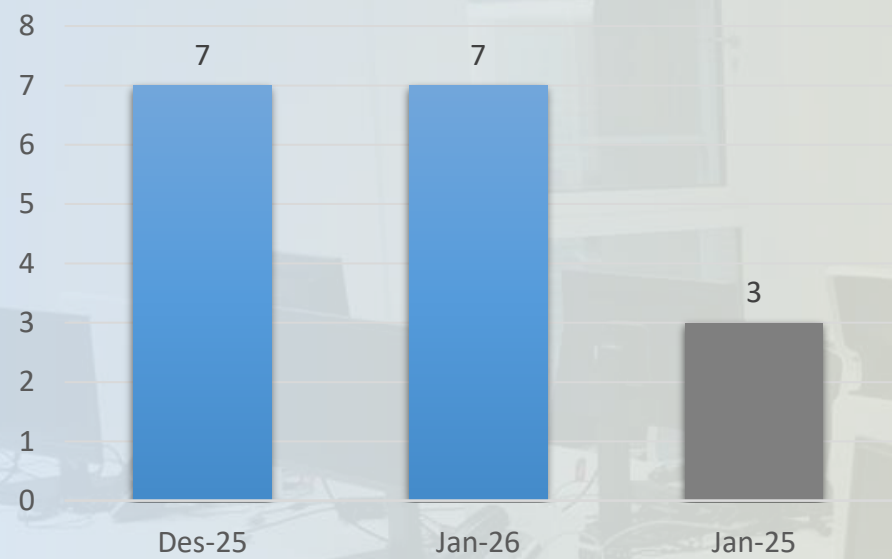
Rincian Publikasi Website



No	Nama Publikasi	Jenis Publikasi
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Peraturan
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat	Peraturan
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Peraturan
4	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Peraturan
5	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026	Konsultasi Publik
6	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Konsultasi Publik
7	Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Peraturan

Publikasi Webinar/FGD/Workshop

Perkembangan Publikasi Webinar DJPK



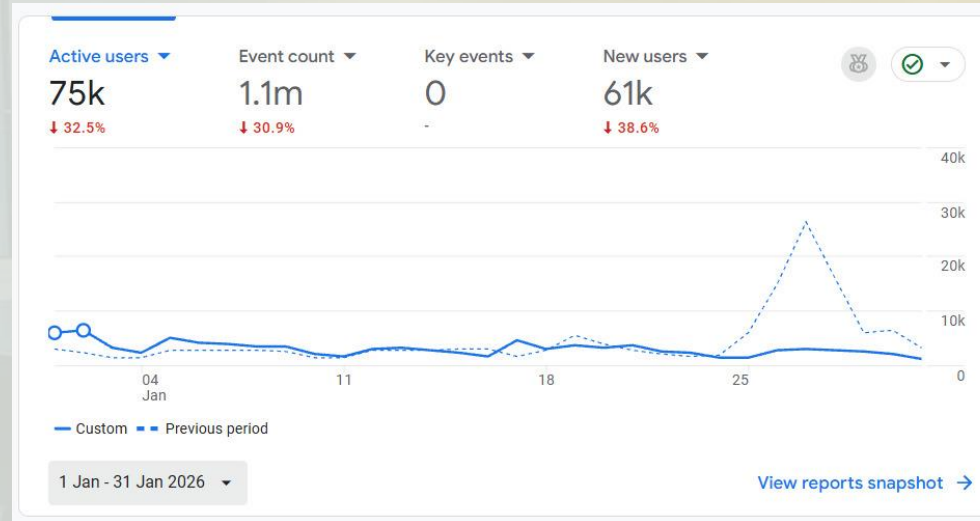
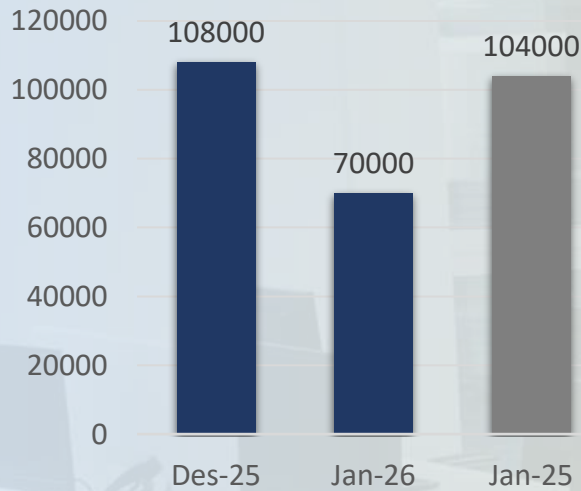
Publikasi webinar Januari 2026 **tetap** jika dibandingkan dengan publikasi webinar bulan sebelumnya (7) dan **naik (113%)** jika dibandingkan dengan publikasi Januari 2024 (3)

No	Nama Webinar	Jenis Webinar
1	Kunjungan Gubernur Kepulauan Riau	FGD
2	HUT DJPK	Sosialisasi
3	Bazaar DJPK	Workshop
4	Penutupan Bazaar	Workshop
5	RAT Koperasi	FGD
6	Menerima Kunjungan Komunitas Musik Jalanan (Komjal)	FGD
7	Townhall Meeting DJPK	FGD



Kunjungan Website DJPK

Perkembangan Kunjungan Website



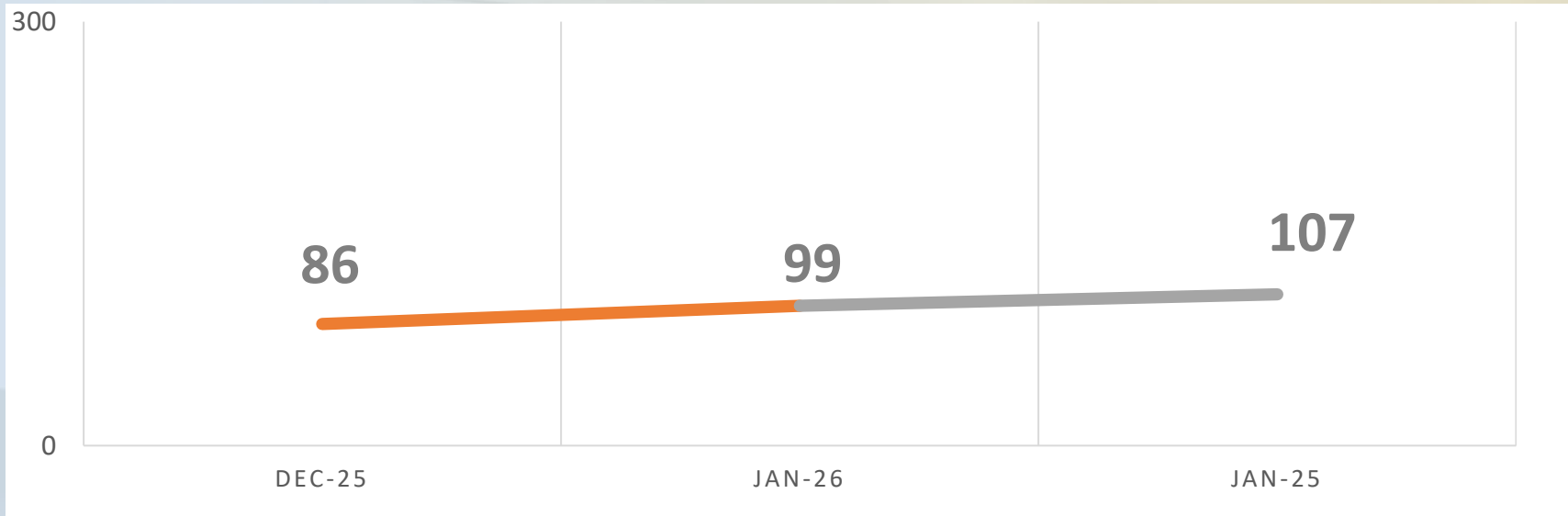
Jumlah pengunjung website DJPK selama Januari 2026 sekitar 75.000, **turun 31%** dibandingkan bulan sebelumnya (108.000). Jika dibandingkan dengan Januari 2025 (104.000), pengunjung website pada Januari 2026 **turun 28%**.

Halaman yang paling banyak diakses antara lain

- Portal Data SIKD
- Rincian Dana Desa per Desa TA 202
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- Data APBD | Setelah TA 2006
- Form Download Data APBD



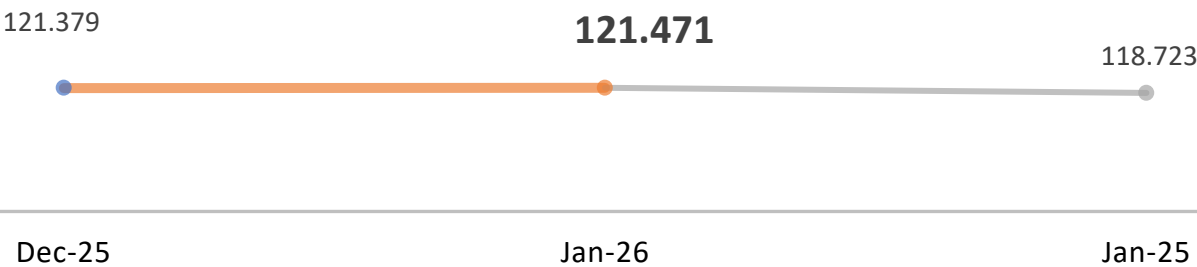
Publikasi Konten Media Sosial DJPK



1. Media Sosial DJPK terdiri dari Instagram (@ditjenpk), Twitter (@DitjenPK), Facebook (DJPK), dan Tiktok (@ditjenpk).
2. Jumlah publikasi konten media sosial DJPK pada Januari 2026 naik 15% dibanding bulan sebelumnya (86). Jika dibandingkan dengan Januari 2025 (107), jumlah publikasi konten media sosial DJPK turun 7%.



Grafik Perkembangan Pengikut Instagram

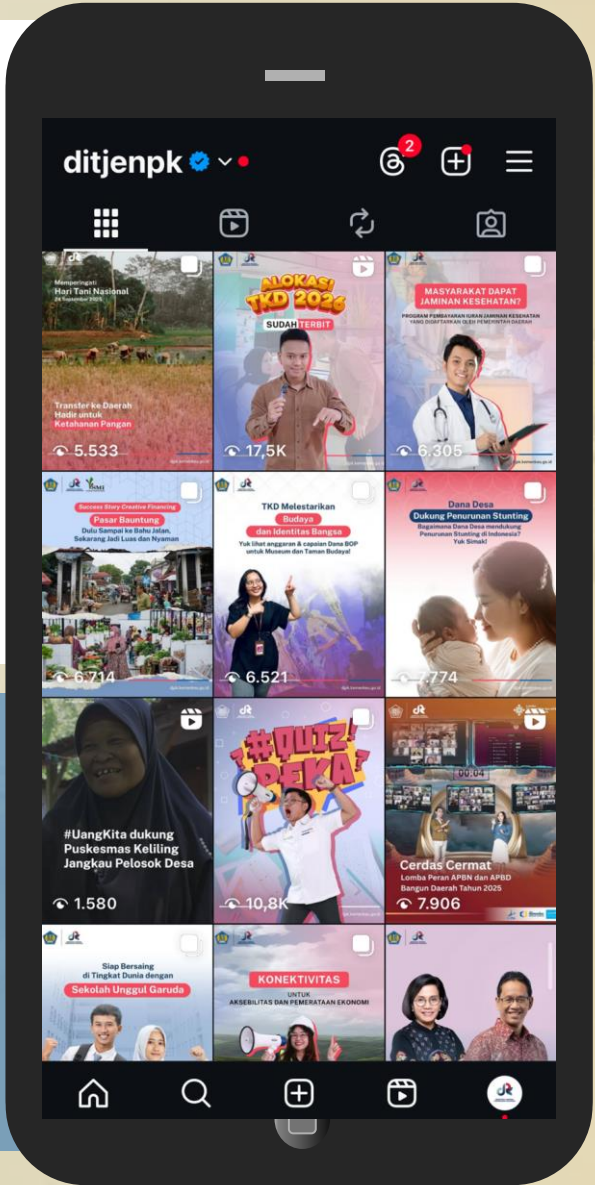


Followers (per 31 Januari)	121.471
Reach (total)	125.854
Reach (rata-rata)	5.479

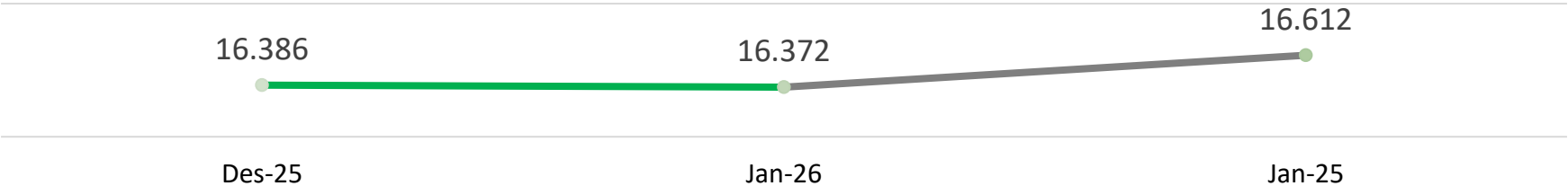
Jumlah Unggahan

22 Feeds

13 story



Grafik Perkembangan Pengikut X (Twitter)



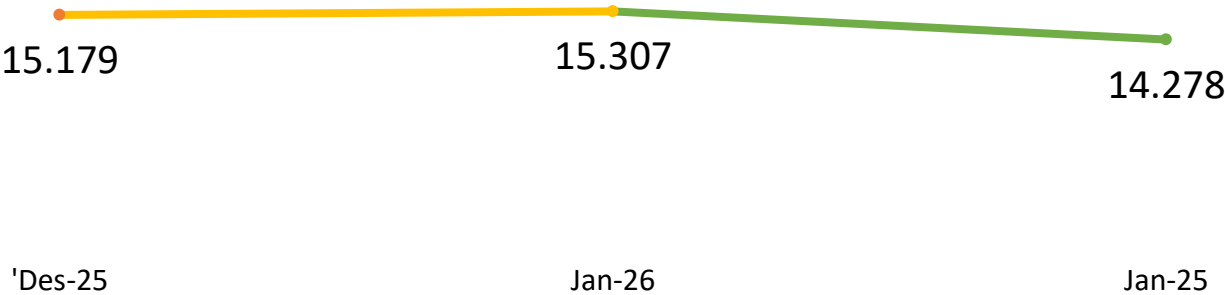
Followers (per 31 Januari)	16.372
Reach (total)	9.886
Reach (rata-rata)	430

Jumlah Konten

37 Konten



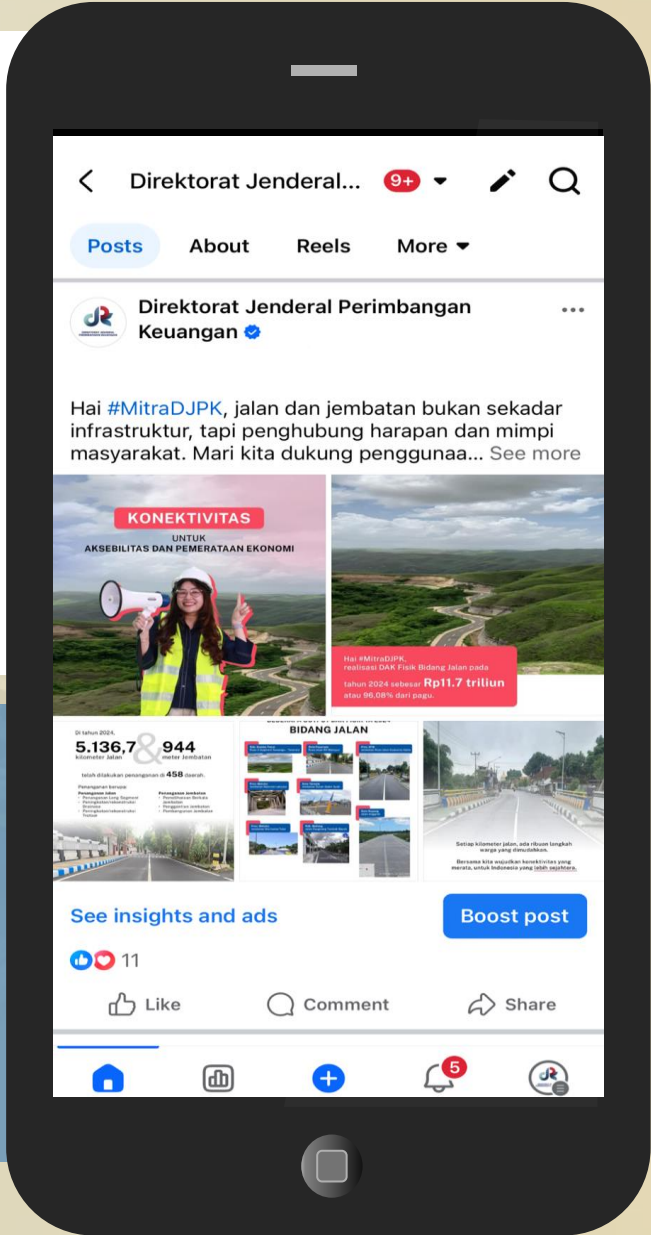
Grafik Perkembangan Pengikut Facebook



Followers (per 31 Januari)	15.307
Total Reach	34.738
Reach (rata-rata)	1.447

Jumlah Konten

24 Konten



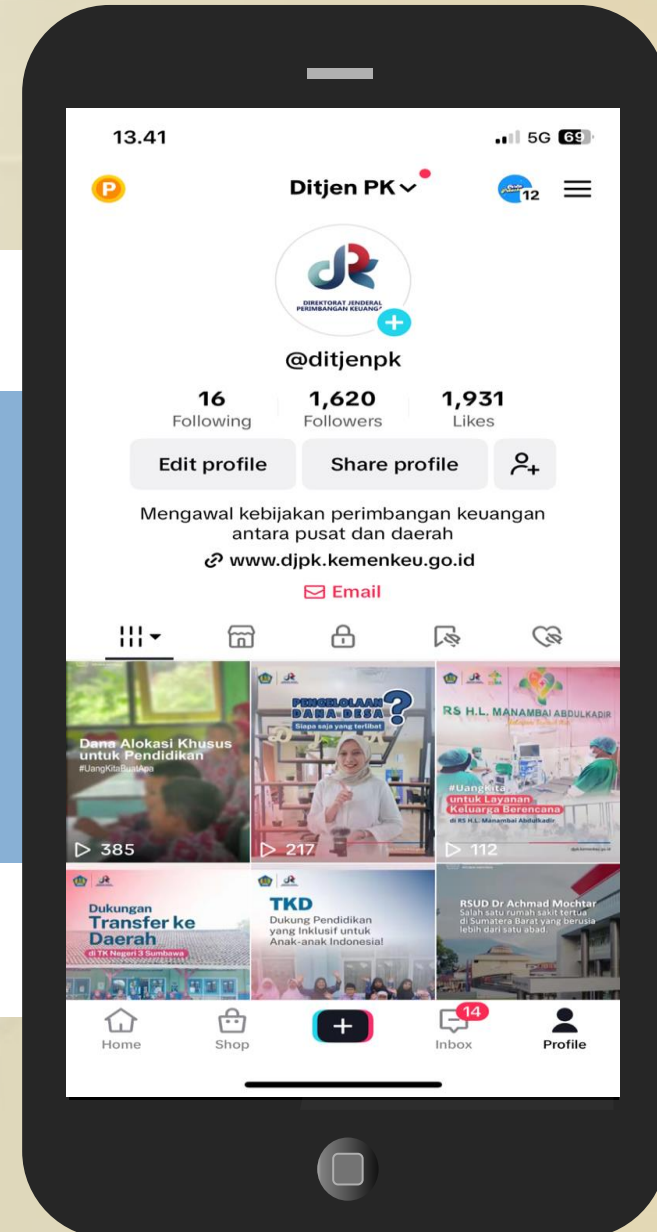
Performa Tiktok

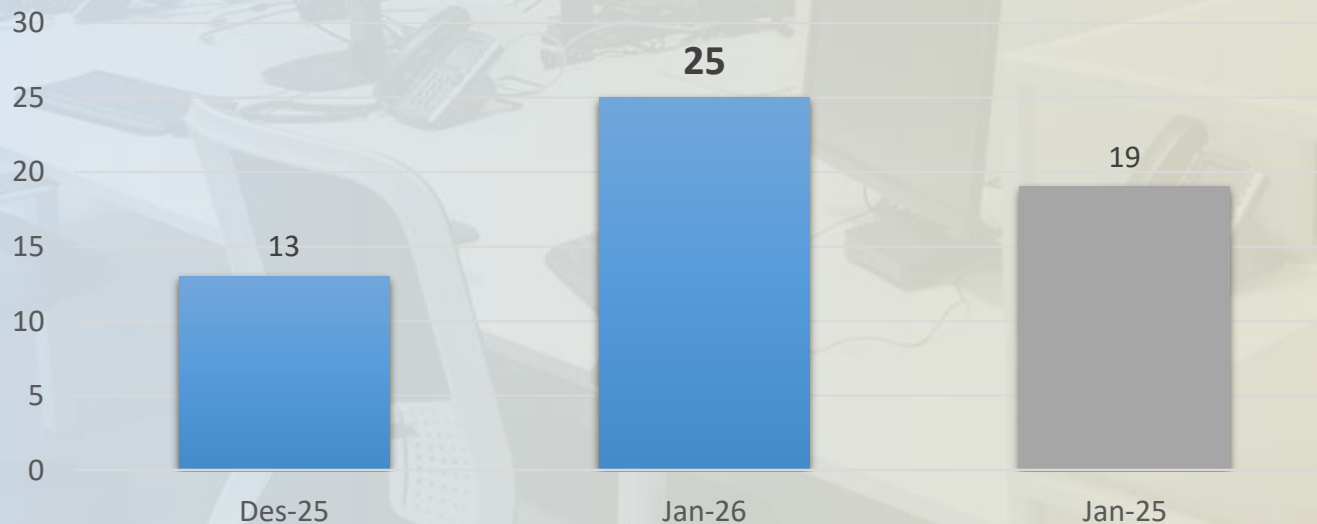
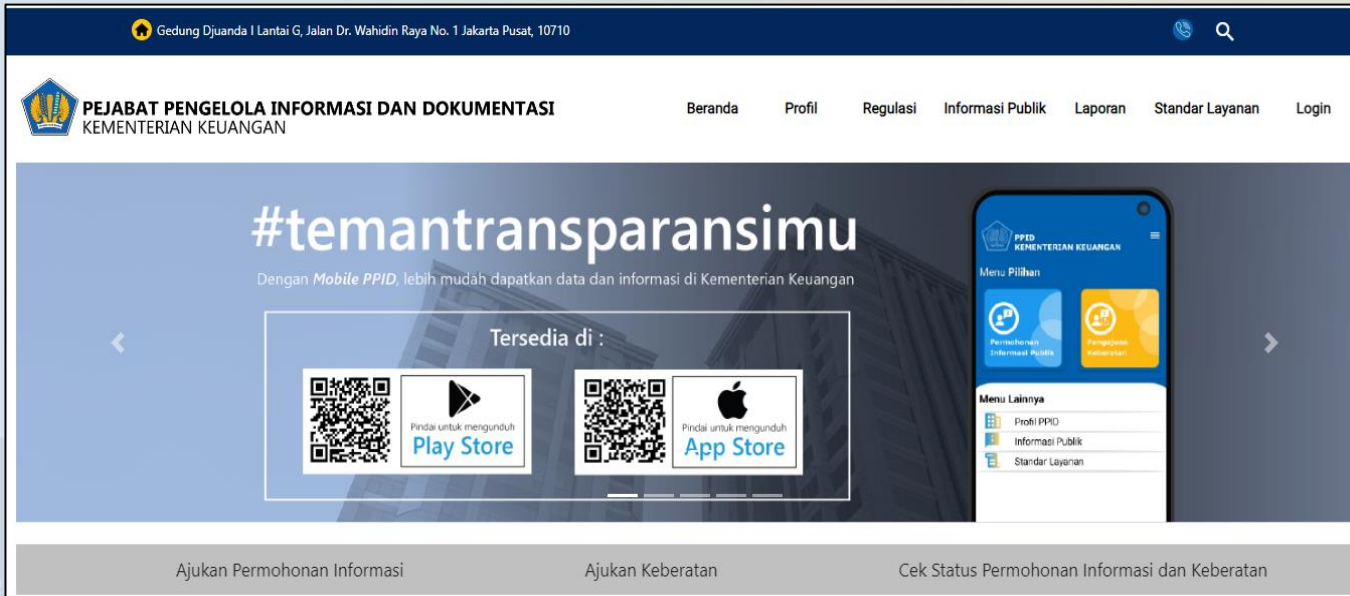
Dalam rangka memperluas cakupan penyebaran informasi, mulai Januari 2026, DJPK menambah 1 akun media sosial: Tiktok @ditjenpk

Followers (per 31 Januari)	1.620
Total Reach	319
Reach (rata-rata)	106

Jumlah Konten

3 Konten





Selain mempublikasikan data dan informasi melalui website dan media lainnya, DJPK juga melayani permohonan informasi/data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK.

Pada bulan Januari 2026 terdapat **25** permohonan.

Sebagian besar permintaan data dalam rangka keperluan penelitian. Data yang diminta mencakup:

- Data anggaran dan realisasi APBD
- Data anggaran dan realisasi Transfer ke Daerah

Permohonan data pada Januari 2026 naik 92% dibanding dengan bulan sebelumnya (13) dan naik 32% dibandingkan Januari 2025 (19).

Employee Advocacy



Realisasi *Employee Advocacy* 2026 Edisi 01

Version 1.0 - last update on
2 Feb 2026 13:36 WIB by Heri Iskandar

Periode: 9 Jan 2026 - 23 Jan 2026, Judul: Kaleidoskop 2025

Capaian Target

152,53%

Target 100%

Selisih +52,53%

Jumlah Pegawai

302

Target 198

Selisih +104

Jumlah Aktivasi

313

Like/komen/share 281 89,78%

Konten Tersedia 29 9,27%

Konten Mandiri 3 0,96%

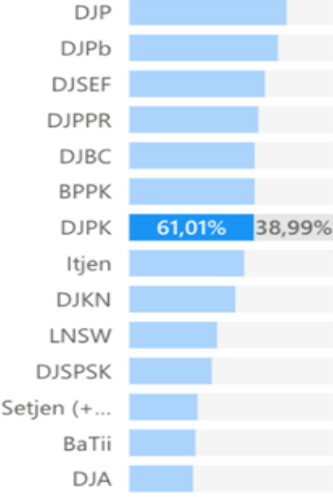
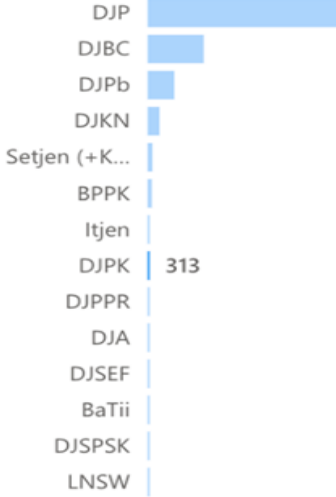
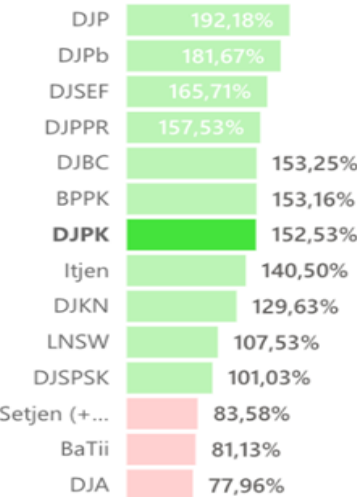
Persentase Pegawai

61,01%

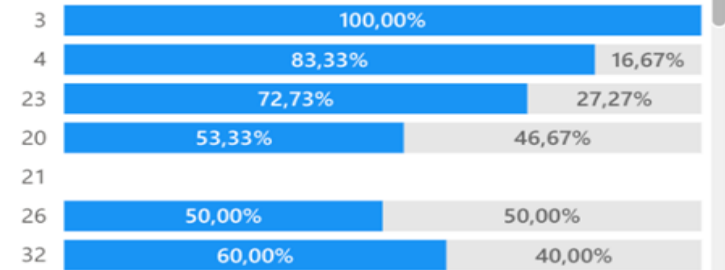
Seluruh Pegawai 495

Generasi

Gen X (1965-1979)	47,97%	52,03%
Millenials (1980-1996)	65,90%	34,10%
Gen Z (1997-2009)	73,17%	26,83%
Boomers (<1965)	100,00%	



Lama Kerja (tahun)



Jumlah Medsos

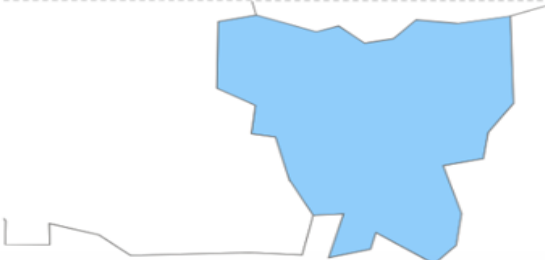
333



Jenis Kelamin

Perempuan	66,67%	33,33%
Laki-laki	58,26%	41,74%

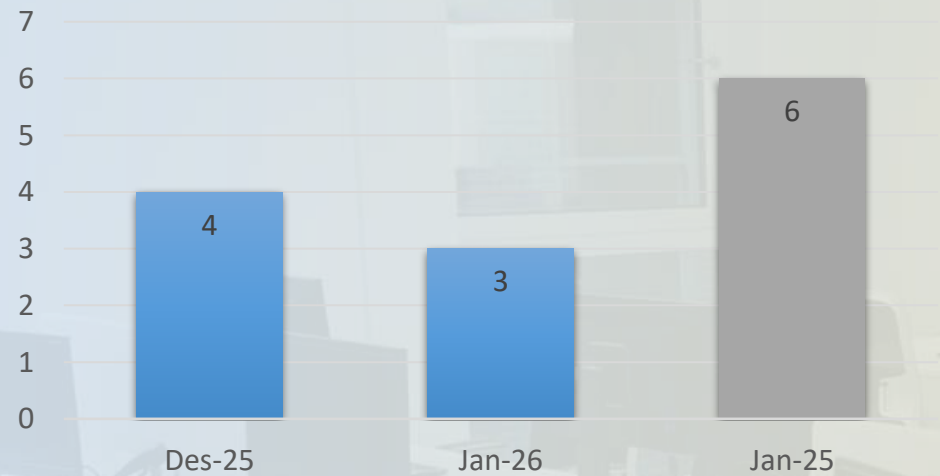
Sebaran Pegawai



Target DJPK 198 pegawai

Layanan Email dan WA Blast

Perkembangan Layanan Email dan WA Blast



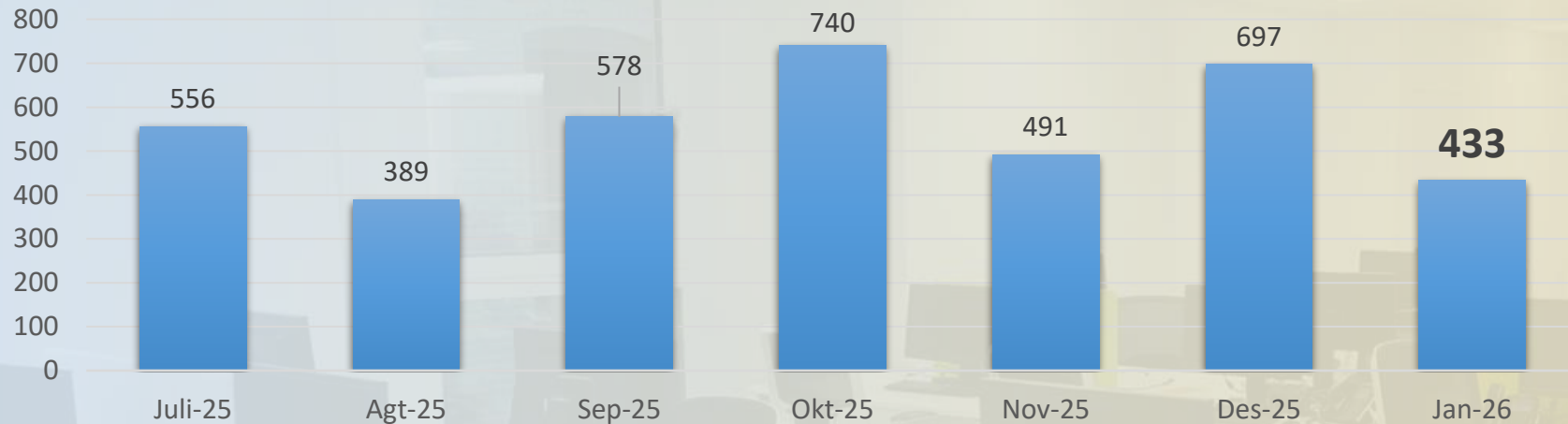
Mulai 16 Juni 2025, layanan distribusi informasi melalui email dan whatsapp blast dilakukan oleh Kemenkeu PRIME dengan permohonan/korespodensi dari DJPK

No	Jenis Blast	Nama Blast
1	Email	Penyampaian PMK Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
2	Email dan Whatsapp	Penyampaian Surat Direktur Dana Transfer Umum Nomor S-1/PK.2/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Permintaan Narahubung/Contact Person Koordinasi Pengelolaan DBH DR TA 2026
3	Email dan Whatsapp	Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-10/PK/PK.2/2026 tanggal 19 Januari 2026 hal Pemberitahuan Syarat Salur DBH Semester I Tahun 2026



Tiket Konsultasi DJPK

Perkembangan Jumlah Tiket Konsultasi Pasca Konsolidasi



Jumlah konsultasi pada Januari 2026 turun 38% dibandingkan bulan sebelumnya (697)

Januari 2026
433 Tiket

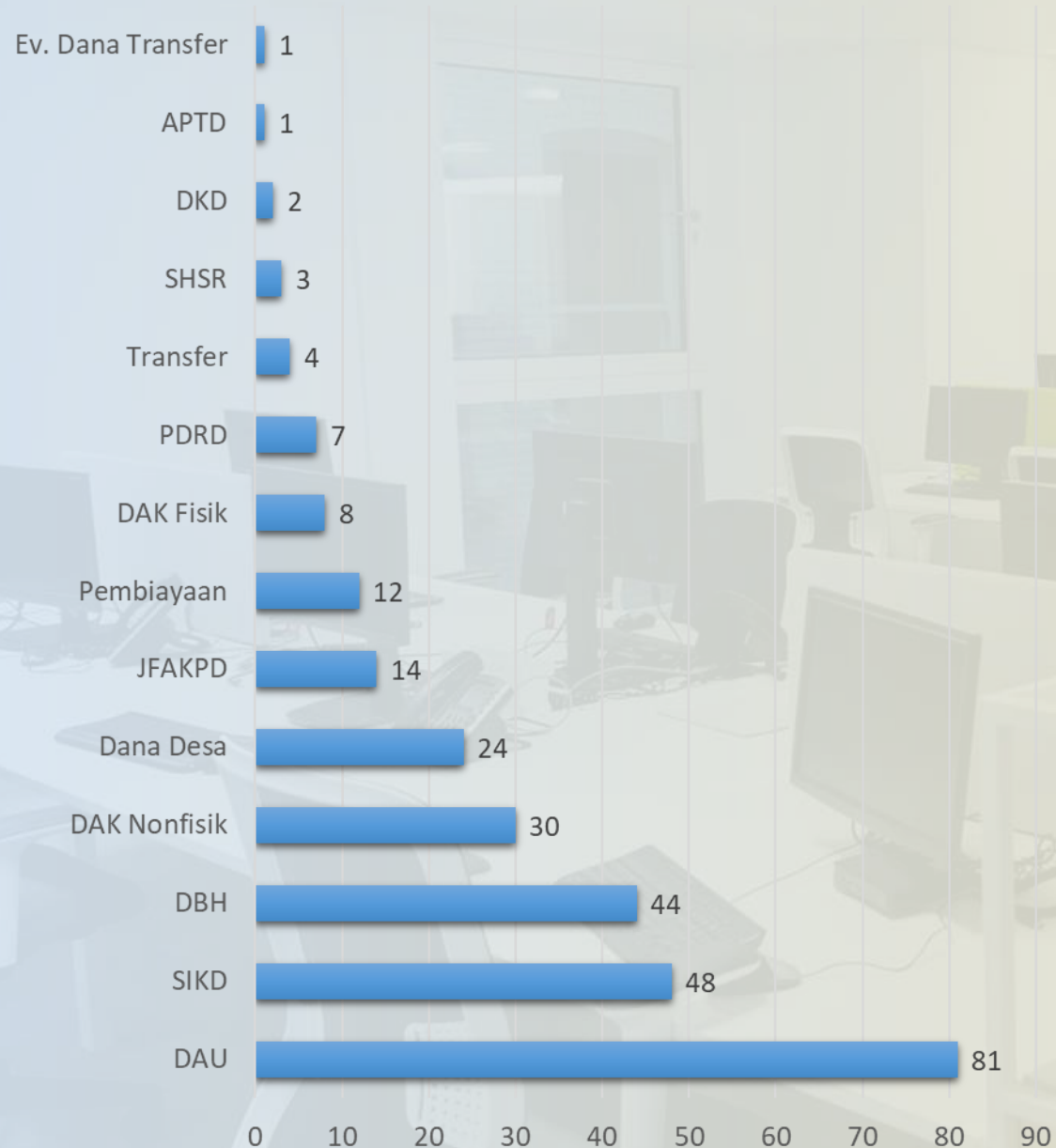
**Dijawab oleh L1
PRIME**
126 (29,11%)

**Dijawab oleh L2
DJPK**
251 (57,97%)

**Di jawab oleh L3
Unit Teknis**
56 (12,93%)

*Sebagian besar tiket konsultasi pengguna layanan melalui Kemenkeu PRIME diselesaikan oleh Agen L2 DJPK.

Topik Konsultasi Teknis



Topik DAU

1. Informasi penyaluran dan status penyampaian laporan data THR dan Gaji ketiga belas bagi ASN guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD, tetapi tidak menerima TPP; dan
2. Informasi terkait DAU Tambahan 2025.

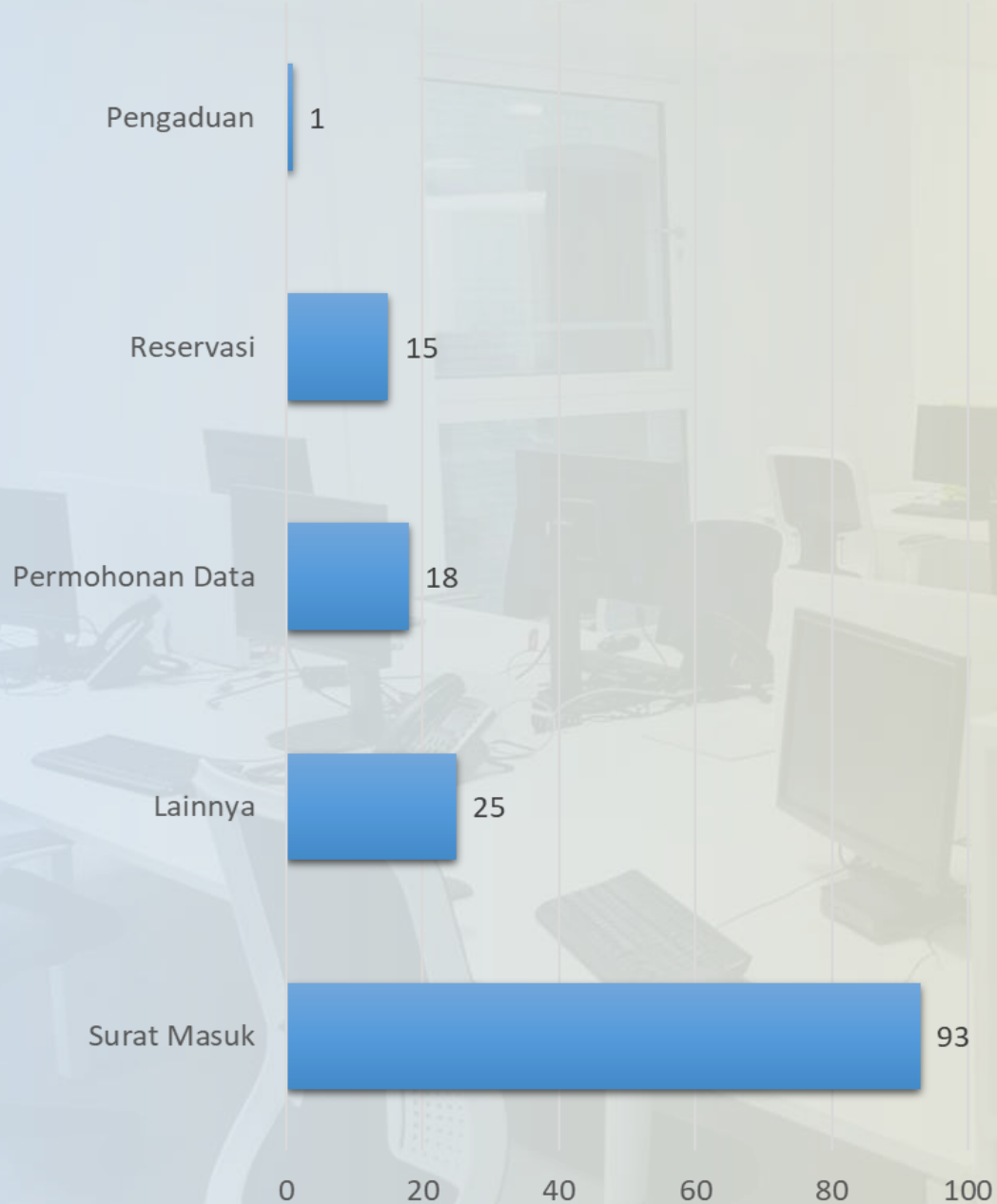
Topik SIKD

1. Informasi SIKD-NG Modul Lacak Penyaluran (Caklur)
2. Informasi interkoneksi SIKD dengan SIPD
3. Username dan Password SIKD-NG
4. Informasi terkait SIKD-DAU

Topik DBH

1. Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH pada tahun 2025
2. Informasi terkait BAR Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Topik Konsultasi Non-teknis



Surat Masuk

terdiri dari:

- Penyampaian surat masuk dengan tujuan DJPK
- Konfirmasi tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan ke DJPK

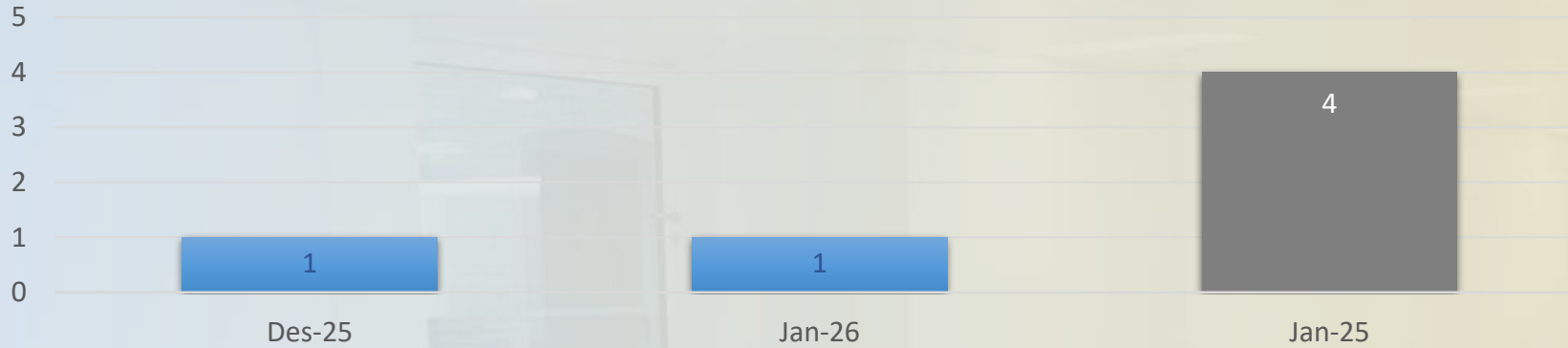
Lainnya

Informasi berkaitan dengan hal lain selain Surat Masuk, Reservasi, Permohonan Data, Pengaduan, Keluhan Kebijakan, dan Tidak terkait Kemenkeu.

Permohonan Data

- Informasi terkait data yang tersedia dan tidak tersedia pada website DJPK
- Informasi permohonan data melalui PPID

Pengaduan



Pengaduan

Pada Januari 2026, terdapat 1 pengaduan yang disampaikan oleh ASND Guru dari Prov. Sumatera Barat terkait dengan belum dibayarkannya THR dan Gaji Ketiga Belas sebesar TPG/Tamsil bagi ASND Guru yang tidak menerima TPP/Tukinda kepada guru penerima.

Jumlah pengaduan Januari 2026 sama jika dibanding bulan sebelumnya (1) dan turun sebesar 75% bila dibanding Januari 2025 (4).

Masukan dari Pengguna Layanan

Pada Januari 2026, DJPK menerima masukan dari pengguna layanan terkait dengan kebijakan pendekatan transparansi Dana Desa secara bertahap melalui penyediaan dashboard publik di tingkat kabupaten percontohan.

Masukan ini bertujuan untuk: meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, memperkuat kepercayaan publik, meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran di tingkat desa, dan menghindari potensi gejolak sosial akibat penerapan kebijakan yang bersifat mendadak dan serentak.



Pengguna Layanan

75,55%

Pemerintah Daerah

327 Pengguna
(termasuk Anggota/ Pimpinan
DPRD dan Perangkat
Daerah/Desa)

12,93%

Kementerian/Lembaga

56 Pengguna
(Kementerian Teknis
dan Lembaga di dalam
dan luar Kemenkeu)

8,07%

Lainnya

35 Pengguna
(Masyarakat, Pendamping Desa,
Wartawan/ Media,
dan Swasta)

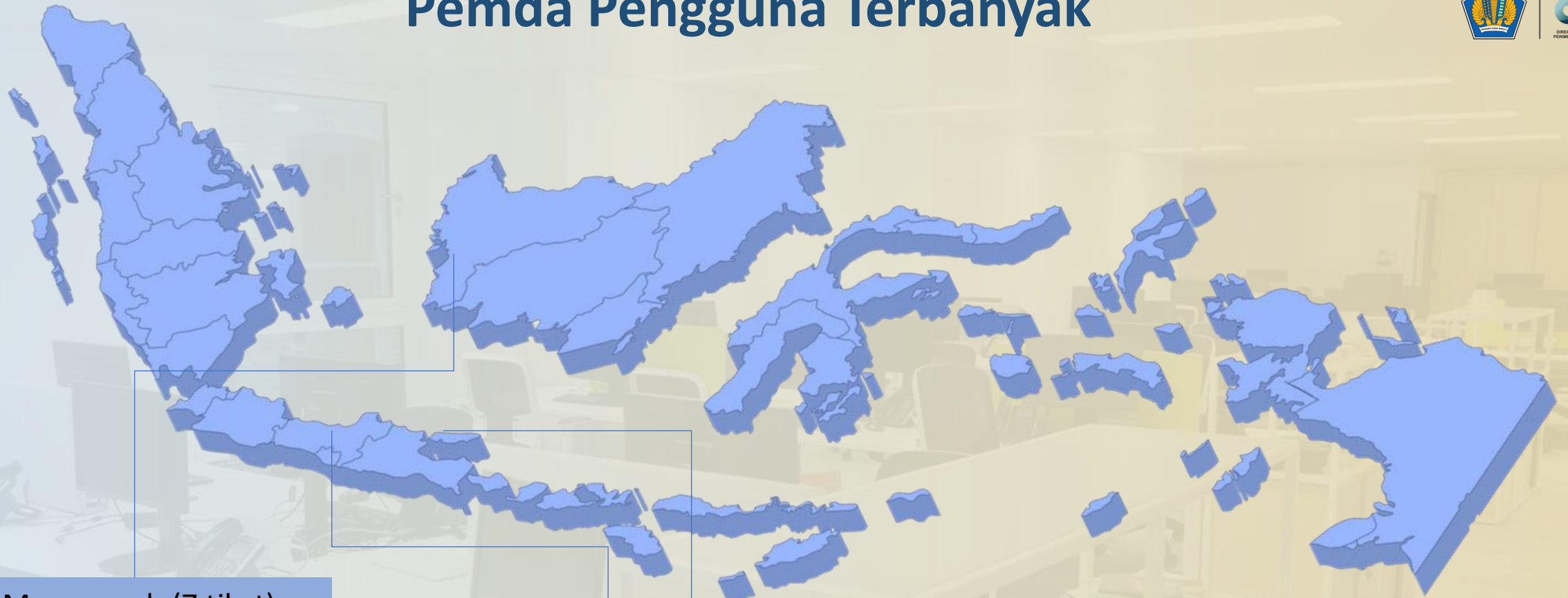
3,45%

Akademisi

15 pengguna
(Guru,Dosen,
Mahasiswa, dan
Siswa sekolah)



Pemda Pengguna Terbanyak



Kab. Mempawah (7 tiket)
Konsultasi terkait DAU dan
SIKD

Kab. Purworejo (6 tiket)
Konsultasi terkait DAU

Kab. Sumenep (6 tiket)
Konsultasi terkait DAU,
SIKD, dan Surat Masuk

Rincian Tiket Konsultasi

Selama Januari 2026, dari total tiket konsultasi, sebanyak 384 tiket **dapat** diidentifikasi asal zona waktu, sedangkan 49 tiket sisanya **tidak dapat** diidentifikasi.

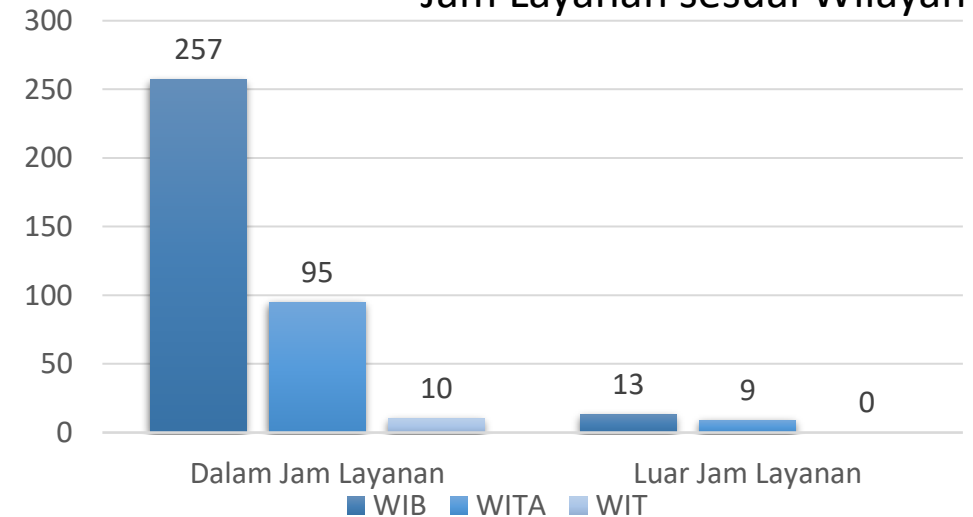
Dari 384 tiket yang dapat diidentifikasi zona waktunya, 362 pengguna layanan menghubungi DJPK di dalam jam layanan, sedangkan 22 sisanya menghubungi DJPK di luar jam layanan yang terdiri dari:

- 13 (59 %) dari bagian barat (WIB) dan
- 9 (41 %) dari bagian tengah (WITA).

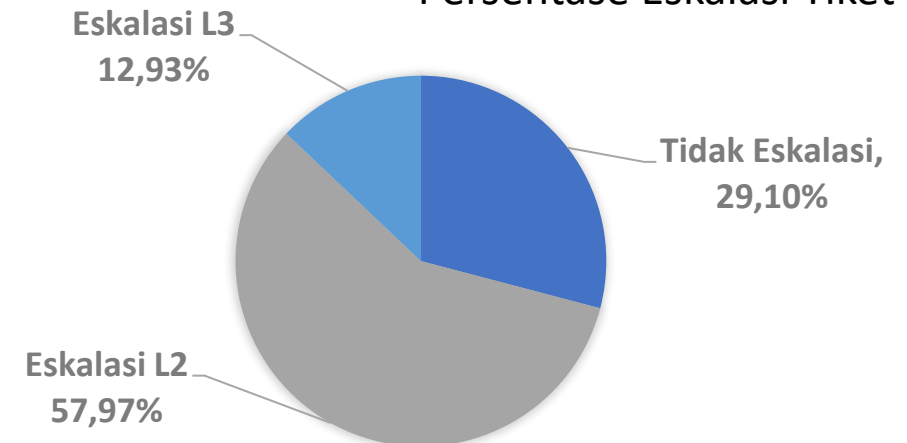
Dari 433 tiket layanan konsultasi DJPK, sebanyak 307 tiket (70,9%) dieskalasi oleh agent L1 Kemenkeu PRIME ke agent DJPK.

Dari 433 tiket, sebanyak 251 tiket (57,97%) diselesaikan oleh agent L2 DJPK sedangkan sebanyak 56 (12,93%) tiket eskalasi diselesaikan oleh agent L3 DJPK.

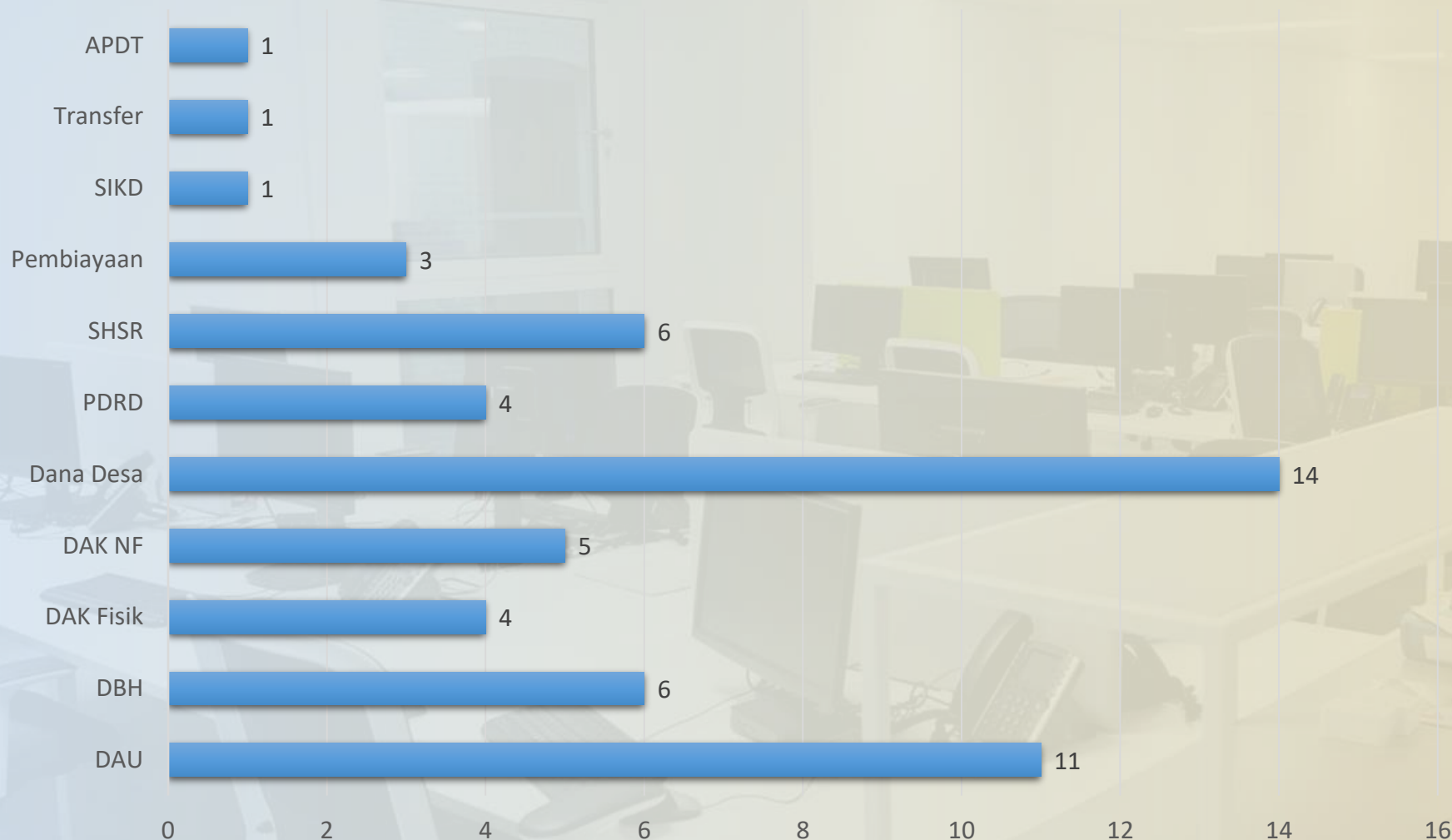
Jumlah Pemda Menghubungi di Dalam dan Luar Jam Layanan sesuai Wilayah



Persentase Eskalasi Tiket



Jumlah FAQ/Knowledge Base Contact Center DJPK yang Perlu Di-review



****Data diperoleh dari FAQ bulan 3 (tiga) bulan terakhir pada tautan <https://bit.ly/FAQDJPK> berdasarkan isian pada kolom perbaikan.**



Kepuasan Pengguna Layer 2 (L2) DJPK



LINNA: ★★★★★★
Sangat Baik



DIAN : ★★★★★★
Sangat Baik



HANNA
(Cuti Bersalin)



RONALD : ★★★★★★
Sangat Baik



HORAS : ★★★★★★
Sangat Baik

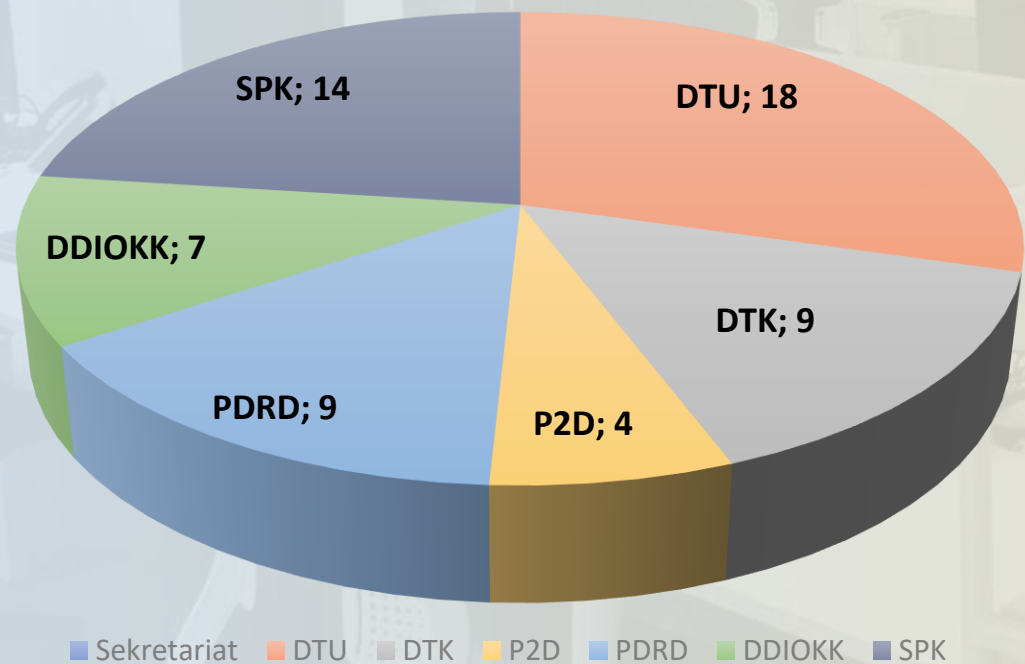
Penilaian Kepuasan Pengguna Layanan L2 DJPK menggunakan indikator *Customer Satisfaction Score* (CSAT) berdasarkan *feedback* yang diterima pada aplikasi CRM Deskpro.



Layer 3 (L3) Unit Teknis DJPK

Mulai Juli 2024, Layer 2 (L2) melibatkan seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK. Sejak 16 Juni 2025, Unit Teknis DJPK yang sebelumnya berperan sebagai L2 telah berubah menjadi L3 DJPK. Apabila diperlukan eskalasi, Agent L1 Kemenkeu Prime dapat meneruskan ke Agent L2 DJPK dan dapat dieskalasi lebih lanjut ke L3 Teknis DJPK.

61 Tiket Dieskalasi via Aplikasi CRM Deskpro ke Layer 3 pada Januari 2026



Agen Layer 3	Capaian Rata-rata	Jumlah Tiket Eskalasi
Sekretariat	-	-
DTU	120	18
DTK	120	9
P2D	120	4
PDRD	117,78	9
DDIOKK	105,71	7
SPK	115,71	14
Total Tiket Januari		61

Berdasarkan kecepatan pemberian tanggapan sejak pertanyaan dieskalasi, DTU, DTK, dan P2D mendapatkan nilai capaian rata-rata 120.

Layer 3 (L3) Unit Teknis DJPK

**Tim Reguler Dana Alokasi
Khusus Nonfisik**

#1

The Best Team Kategori Tim dengan
Kinerja Waktu Respon Tercepat
(Capaian *Respon Time*: 120)

**Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan,
Direktorat Dana Transfer
Umum**

#1

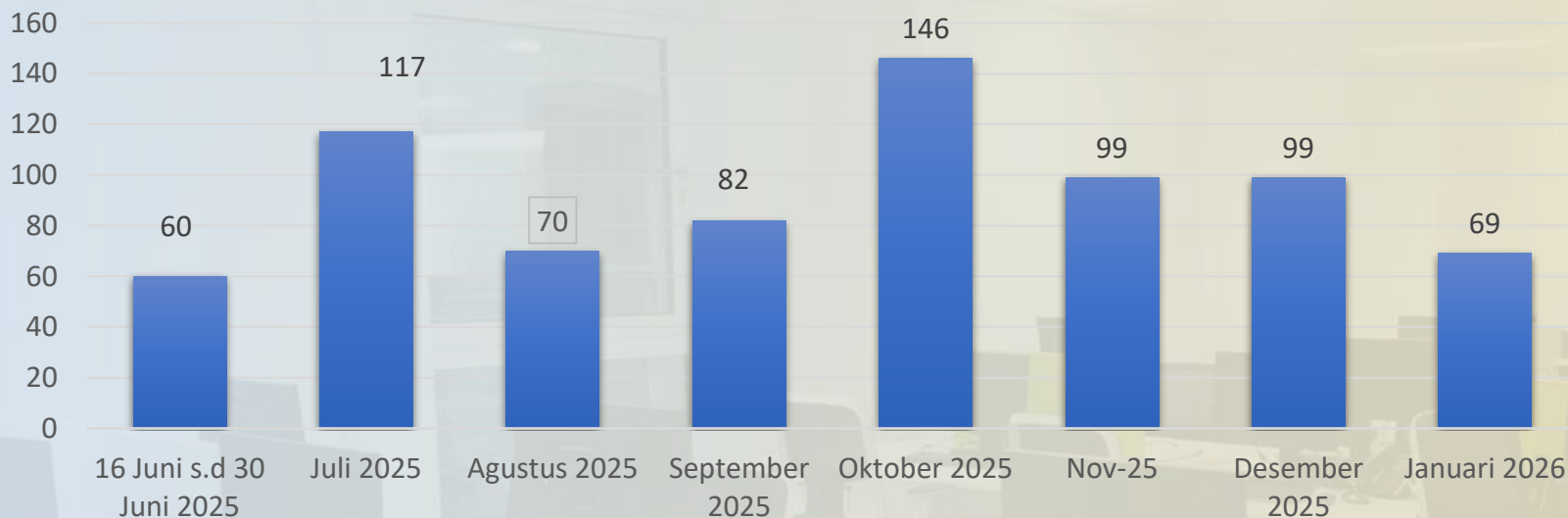
The Best Team Kategori Tim dengan
Kinerja Penanganan Tiket Terbanyak
(Menangani 14 dari 61 tiket: 23%)

Keterangan:

120 : Tanggapan tiket diberikan pada hari H dan H+1
100 : Tanggapan tiket diberikan pada H+2 dan H+3
80 : Tanggapan tiket diberikan setelah H+3

Layanan Reservasi DJPK

melalui email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id

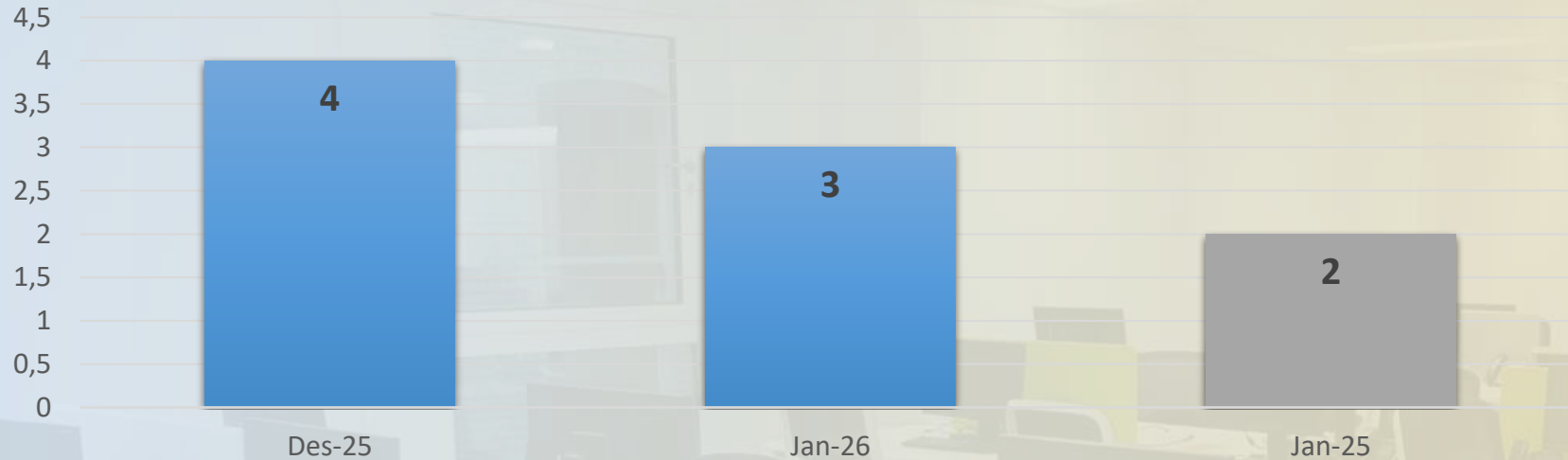


Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK Pasca Konsolidasi Kanal Layanan ke Kemenkeu PRIME:

1. Layanan konsultasi dengan narasumber DJPK melalui 2 (dua) prosedur:
 - *Video Conference*
 - Tatap Muka
2. Reservasi dilakukan melalui email: reservasi.djpk@kemenkeu.go.id
3. Jumlah email yang diterima s.d saat ini: **742** email terkait permohonan konsultasi
4. Agent Layer 2 DJPK bertanggung jawab sebagai tim reservasi yang bertugas menerima, menanggapi, dan mengkoordinasikan permohonan konsultasi yang masuk.



Layanan Konsultasi *Video Conference*

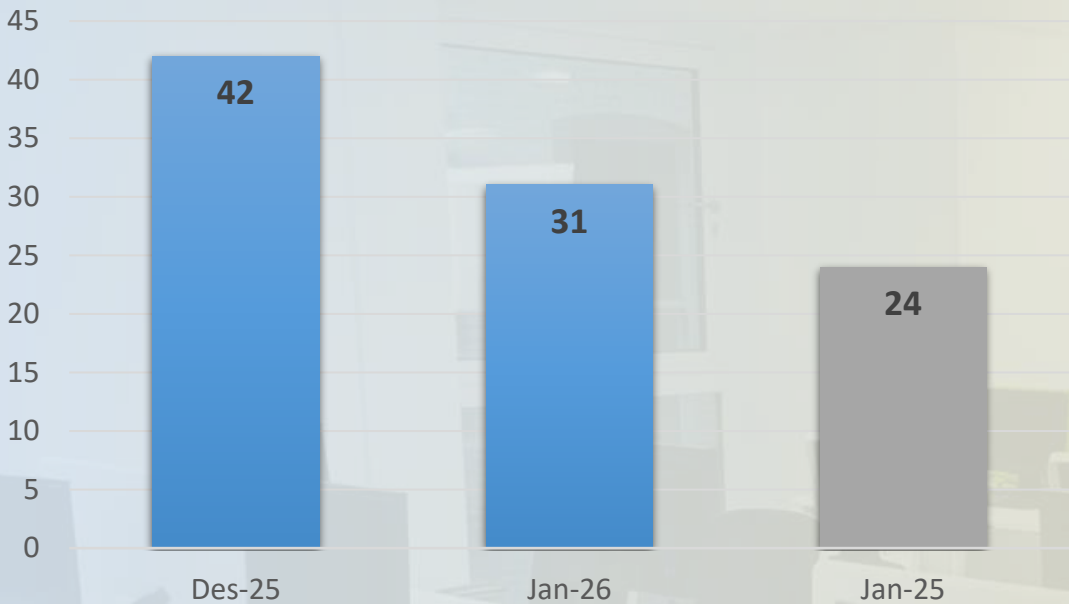


No	Daerah	Tanggal	Topik
1	Kab. Subang	20 Januari 2026	Pembiayaan
2	Prov. NTT	21 Januari 2026	Pembiayaan
3	Kota Bandar Lampung	30 Januari 2026	Kewajiban Pelaporan SIKD

1. Pada Januari 2026, telah dilaksanakan *video conference* melalui aplikasi Ms. Team sebanyak 3 kali.
2. Jumlah *video conference* pada Januari 2026 turun 25% dibanding bulan sebelumnya (4) dan naik 50% dibandingkan Januari 2025 (2).
3. Pasca konsolidasi, terjadi peningkatan permintaan konsultasi melalui video conference.



Layanan Konsultasi Tatap Muka



1. Pada Januari 2026, telah dilaksanakan 31 kali konsultasi tatap muka. Jumlah ini turun 26% dibanding bulan sebelumnya (42), dan naik 29% dibandingkan Januari 2025 (24).
2. Namun, dalam pelaksanaannya beberapa Pemerintah Daerah belum mematuhi ketentuan pelaksanaan konsultasi tatap muka, seperti jumlah tamu yang hadir melebihi ketentuan.

No.	Daerah	Tanggal	Topik	Jumlah Tamu
1	DPRD Kota Batam	5 Januari 2026	RPTKA, Cukai Rokok	4
2	BTN	8 Januari 2026	Transfer	3
3	Kota Surabaya	12 Januari 2026	Defisit APBD	8
4	Kab. Bandung	13 Januari 2026	DAU	11
5	Bank Sulselbar	13 Januari 2026	Pinjaman Daerah	3
6	Kab. Karawang	13 Januari 2026	PMK 120/2025 (DBH)	10
7	Kab. Tasikmalaya	13 Januari 2026	DAU	5
8	Kab. Kuantan Singingi	13 Januari 2026	DAU	10
9	Kab. Kayong Utara	13 Januari 2026	DAU	7
10	Kab. Pulang Pisau	14 Januari 2026	DBH	12
11	Kota Tidore Kepulauan	15 Januari 2026	DBH	4
12	Kab. Kotabaru	15 Januari 2026	JF AKPD	5
13	Kab. Kutai Kartanegara (Bapenda)	19 Januari 2026	DBH	2
14	Kab. Lombok Tengah	19 Januari 2026	PDRD	2
15	Prov. Kep. Bangka Belitung	20 Januari 2026	DBH	15
16	Kota Jambi	21 Januari 2026	PDRD	3
17	Kab. Indramayu	21 Januari 2026	TPG dan DBH	4
18	Kab. Kep. Anambas	22 Januari 2026	DBH	7
19	Kab. Halmahera Barat	22 Januari 2026	DAU Tambahan	1
20	DPRD Kota Tebing Tinggi	22 Januari 2026	Transfer ke Daerah	18
21	DPRD Kab. Bangka Tengah	23 Januari 2026	DBH	8
22	DPRD Kab. Banyumas	26 Januari 2026	DAU	10
23	DPRD Kab. Kudus	27 Januari 2026	DAK Fisik	10
24	Kab. Rokan Hilir	28 Januari 2026	DAU dan DBH	6
25	Kab. Sumedang	28 Januari 2026	PDRD dan DBH	4
26	DPRD Kab. Kutai Kartanegara	29 Januari 2026	DBH	8
27	DPRK Kab. Aceh Jaya	29 Januari 2026	DAU	3
28	Kab. Sleman	29 Januari 2026	TPPASN	5
29	Kab. Kaimana	30 Januari 2026	DBH	2
30	DPRD Prov. Riau	30 Januari 2026	DBH	8
31	Kab. Bolaang Mongondow Timur	30 Januari 2026	Pinjaman Daerah	6

Evaluasi Konsultasi DJPK

1. Terdapat 433 tiket konsultasi, sebagian besar diselesaikan oleh Agen Layer 2 (L2) DJPK. Namun, masih terdapat beberapa tiket yang mengalami keterlambatan penyelesaian karena adanya tiket yang baru dieskalasi oleh Kemenkeu PRIME selang beberapa jam sejak pengguna layanan membuat tiket.
2. Masih terdapat kendala pada email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id, dimana terdapat email pengguna layanan yang masuk ke dalam *black-list* sesuai ketentuan keamanan dari Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTII) sehingga beberapa pengguna layanan menyampaikan keluhan tidak mendapatkan tanggapan dan/atau informasi jadwal dikarenakan email tidak diterima DJPK. Atas kendala ini, DJPK telah menyampaikan tiket ke *Service Desk* BaTII sebanyak 2 (dua) kali yang memuat 3 (tiga) kendala *black-list* email sesuai informasi pengguna layanan yang disampaikan melalui tiket Kemenkeu PRIME dan unit teknis DJPK.
3. Sehubungan dengan mekanisme permohonan konsultasi ke DJPK hanya dapat dilakukan melalui email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id, terdapat pengguna layanan yang memberikan masukan agar pelaksanaan koordinasi konsultasi tatap muka *dan video conference* dapat dilakukan melalui satu nomor whatsapp khusus agar lebih memudahkan, dikarenakan intensitas pengguna layanan mengakses email tidak setinggi akses terhadap whatsapp. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan reservasi, mulai Februari 2026, kami menyediakan satu nomor whatsapp sebagai *helpdesk* untuk mendukung layanan email reservasi DJPK.

Transformasi Layanan Konsultasi DJPK menuju *Full Online*

DJPK merencanakan penerapan Layanan Konsultasi *Full Online* pada bulan Maret 2026, dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu, serta aksesibilitas dan fleksibilitas layanan.

Sampai dengan saat ini, kami telah melakukan beberapa upaya persiapan antara lain:

- menyusun *timeline* implementasi layanan
- melakukan identifikasi pro cons
- mereviu SOP standar layanan
- melakukan rapat dengan Dit. SPK dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana aplikasi reservasi konsultasi
- menyusun dan menyampaikan *User Requirement* (UR) aplikasi reservasi layanan konsultasi
- menyusun *draft* Surat Edaran terkait layanan konsultasi.

Dalam rangka transformasi layanan konsultasi menjadi *Full Online*, kiranya dapat diberikan tambahan 3 (tiga) orang pegawai pada Contact Center DJPK yang selanjutnya 2 orang akan bertugas sebagai agen layanan dan 1 orang sebagai *dedicated agent* konsultasi *video conference*.

Dedicated agent video conference akan diberlakukan sistem *rolling* penugasan di antara agen Contact Center DJPK.



TERIMA KASIH

**Bersama, Kita Tingkatkan Layanan
Publik yang Lebih Baik**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat 10710
Gedung Radius Prawiro

